

“Kalau rumah dan sekolah adalah tempat teraman, kenapa dari sanalah banyak luka bermula?”

Diskusi terbuka. Boleh kamu setuju, boleh kamu bantah — yang penting kamu pikir.

"Ruang Aman yang Retak dari Dalam"

Sepanjang pekan ini, linimasa dipenuhi kabar yang membentur asumsi paling dasar tentang keamanan: seorang guru yang mencederai muridnya, seorang istri di Cirebon yang mengalami kekerasan dari sosok yang seharusnya menegakkan hukum, dan lingkungan sekolah yang namanya diseret ke peredaran konten menyimpang. Ada pola yang mengganggu di balik semua ini. Kekerasan tidak datang dari orang asing di gang gelap — ia datang dari dalam institusi yang justru dibangun untuk melindungi. Fenomena ini menuntut analisis yang lebih tajam daripada

sekadar kemarahan kolektif, karena kemarahan cepat menguap, sementara pola strukturalnya bertahan.

Lensa pertama datang dari sosiologi kekuasaan. Kekerasan dalam relasi otoritas — guru terhadap murid, aparat terhadap warga, orang tua terhadap anak — selalu difasilitasi oleh asimetri kuasa dan legitimasi yang melekat pada peran. Korban tidak melawan karena pelaku memegang otoritas moral atau institusional yang membuat perlawanan terasa mustahil. Implikasinya, penjagaan tidak cukup dengan mengawasi orang asing; ia menuntut pengawasan terhadap mereka yang berkuasa di ruang tertutup. Namun celah lensa ini: jika semua relasi otoritas dicurigai, kepercayaan sosial runtuh dan institusi menjadi lumpuh oleh kecurigaan. Pertanyaannya: bagaimana membangun akuntabilitas tanpa menghancurkan kepercayaan yang menjadi syarat berfungsinya sebuah masyarakat?

Lensa kedua berangkat dari teologi amanah. Dalam kerangka Islam, otoritas bukan hak istimewa melainkan *amanah* — titipan yang menuntut pertanggungjawaban. Prinsip *hifz an-nasl*, menjaga keturunan, menempatkan perlindungan anak dan keluarga sebagai salah satu tujuan tertinggi syariat, sederajat dengan menjaga agama dan jiwa. QS. An-Nisaa: 9 mengingatkan tentang kekhawatiran pada nasib "anak-anak yang lemah" sebagai basis takwa. Implikasinya, dalam kacamata ini, melukai yang lemah bukan sekadar pelanggaran hukum positif, melainkan pengkhianatan kosmis atas titipan Ilahi. Tetapi celah lensa ini muncul ketika bahasa "amanah" dipakai justru untuk menutupi: berapa banyak kasus dibungkam atas nama "menjaga nama baik" lembaga keagamaan? Pertanyaan yang muncul: apakah kerangka religius memperkuat perlindungan korban, atau kadang malah dijadikan tameng pelaku?

Lensa ketiga bersumber dari psikologi trauma. Ilmu kesehatan jiwa menunjukkan bahwa luka akibat kekerasan oleh figur kepercayaan jauh lebih dalam daripada kekerasan oleh orang asing, karena ia menghancurkan kapasitas korban untuk mempercayai secara umum. Ini

menjelaskan mengapa banyak korban diam bertahun-tahun. Implikasinya, respons masyarakat tak boleh berhenti pada menghukum pelaku; ia harus menyediakan pemulihan bagi korban. Celah lensa ini: pendekatan terapeutik yang murni individual berisiko memindahkan beban perbaikan kepada korban ("sembuhkan dirimu") dan melepaskan tanggung jawab kolektif atas struktur yang memungkinkan kekerasan. Pertanyaannya: sejauh mana penyembuhan adalah urusan pribadi, dan sejauh mana ia adalah kewajiban komunitas?

Lensa keempat memakai kacamata kritik media digital. Kasus-kasus ini viral, dan viralitas punya dua wajah. Di satu sisi, ia membongkar apa yang dulu tertutup dan memberi suara pada korban. Di sisi lain, ia mengubah tragedi menjadi tontonan, mempercepat penghakiman sebelum proses hukum, dan tak jarang mengorbankan kehormatan korban demi angka tayangan. Prinsip Islam tentang menutup aib dan tidak menuduh tanpa bukti — sebagaimana termuat dalam baiat yang Rasulullah ﷺ ambil, "tidak menuduh orang yang tidak bersalah" — menawarkan keseimbangan. Namun celah lensa ini: batas antara "membongkar demi keadilan" dan "mengumbar demi sensasi" sering kabur. Pertanyaannya: siapa yang berhak menentukan mana pembongkaran yang membela korban dan mana yang mengeksploitasinya?

Lalu, langkah apa yang terbuka bagi mahasiswa hari ini — di kos, di kelas, di organisasi? Beberapa arah konkret tampak layak ditempuh. Di lingkungan kos atau kontrakan, kepekaan terhadap tanda seseorang yang tiba-tiba menarik diri, disertai kehadiran yang tidak menghakimi, menjadi bentuk perlindungan paling dasar. Di organisasi kampus, keberadaan mekanisme aduan yang jelas dan rahasia masih menjadi pekerjaan rumah — banyak lembaga mahasiswa belum memilikinya. Ketika sebuah kasus viral, menahan diri sebelum ikut menyebarkan menjadi ujian tersendiri; pertanyaannya, apakah yang dibagikan melindungi korban atau justru membuka aibnya. Di ruang diskusi, energi kolektif lebih berguna bila dialihkan dari sekadar mengutuk pelaku menuju pembahasan desain sistem yang mencegah — pengawasan

ruang tertutup, transparansi lembaga, serta literasi tubuh dan batas sejak dini. Adapun bagi mereka yang pernah menjadi korban, mencari bantuan bukanlah kelemahan, melainkan langkah paling berani.

Yang penting bukan menemukan satu lensa yang mengalahkan semuanya, melainkan menyadari bahwa tiap lensa menutupi celah yang dibuka lensa lain. Kekuasaan, teologi, trauma, dan media masing-masing menerangi satu sisi dan menggelapkan sisi lain. Mungkin kematangan bukan pada memilih satu kacamata, tetapi pada kesediaan berpindah-pindah di antaranya sambil tetap memegang satu poros yang tak boleh geser: bahwa yang paling lemah adalah yang paling berhak dijaga.

| Pertanyaan

Q · 01

Bukankah ini masalah sistem hukum yang lemah, bukan urusan agama atau moral personal?

A

Sebagian benar — sistem hukum yang tegas memang syarat penting, dan tanpa itu imbauan moral jadi kosong. Tapi hukum bekerja setelah kejadian; pencegahan lahir dari norma yang dihidupi sehari-hari. Sistem dan moral bukan pilihan biner, keduanya lapisan yang berbeda dari perlindungan yang sama.

Q · 02

Kenapa agama sering dipakai justru untuk membungkam korban atas nama "menjaga nama baik"?

A

Ini kritik yang jujur dan valid. Penyalahgunaan sebuah ajaran tidak sama dengan ajarannya. Prinsip menjaga aib berlaku untuk kesalahan pribadi yang tidak melukai orang lain, bukan untuk menutupi kejahatan terhadap korban. Membungkam korban justru bertentangan dengan perintah menegakkan keadilan.

Q · 03

Apa bedanya artikel ini dengan moralisme generik yang cuma bilang "jadilah orang baik"?

A

Perbedaannya pada spesifisitas. Moralisme generik berhenti pada imbauan; analisis ini menunjuk mekanisme — asimetri kuasa, dinamika trauma, ambivalensi viralitas — dan menawarkan intervensi yang bisa diuji, seperti mekanisme aduan dan pengawasan ruang tertutup. Kritik yang berhenti di "jadilah baik" memang layak ditertawakan.

Q · 04

Kalau saya sendiri skeptis pada agama, apakah kerangka ini masih relevan buat saya?

A

Relevan, karena poros argumennya — melindungi yang paling lemah — bisa diterima dari banyak tradisi etika, sekuler maupun religius. Kerangka Islam di sini berfungsi sebagai satu lensa yang memperkaya, bukan tiket masuk wajib. Kesimpulan praktisnya sama: bangun sistem yang membela korban.

Bukankah menuntut "jangan sebar dulu sebelum proses hukum" itu justru melindungi pelaku yang punya akses ke pengacara mahal?

A

Ketegangan ini nyata dan tidak punya jawaban mudah. Menahan penyebaran melindungi asas praduga tak bersalah, tapi bisa dimanfaatkan pihak yang kuat. Titik tengahnya mungkin: dukung korban dan proses yang transparan, tapi hindari menyebar identitas dan detail yang mengeksploitasi. Membela korban tidak sama dengan menjadi algojo digital.